

## PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAH DESA CUPAK KABUPATEN JOMBANG

**Irda Agustin Kustiwi**

Program Studi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [irdakustiwi@untag-sby.ac.id](mailto:irdakustiwi@untag-sby.ac.id)

**Tri Ratnawati**

Program Studi Akuntansi, Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: [triratnawati@untag-sby.ac.id](mailto:triratnawati@untag-sby.ac.id)

**Abstract.** Village fund and budget programs are activities carried out by the central government to develop Indonesia in developing village potential by empowering the local economy to realize community independence and create sustainable, independent villages. Cupak village, Ngusikan sub-district, Jombang district is one of the villages that has the potential for a religious tourism village, part of the villages assisted by the Higher Education Matching Fund by the accounting study program at the University of 17 August 1945 Surabaya. This village has a phenomenon that shows a level of independence in the management of the budgeting process that is still lacking by the local government. This explains the need for internal audits in the process of improving regional finances so that they can be used properly by both the regional government and the community. The research team chose a qualitative approach to produce internal audit results regarding the budgeting process and fund allocation in the Cupak religious tourism village, Jombang. They will also provide advice to interested parties. Researchers hope that the government and the community of Cupak village, Jombang will be involved in the process of preparing, implementing and being accountable for village fund budgeting.

**Keywords:** internal audit; process; budgeting; village funds; cupak

**Abstra.** program dana dan anggaran desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membangun indonesia dalam mengembangkan potensi desa dengan pemberdayaan ekonomi lokal untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa mandiri yang berkelanjutan. Desa cupak, kecamatan ngusikan, kabupaten jombang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi desa wisata religi, bagian dari desa binaan matching fund dikti oleh program studi akuntansi universitas 17 agustus 1945 surabaya. Desa ini memiliki fenomena yang menunjukkan tingkat kemandirian dalam tata kelola proses penganggaran yang masih kurang oleh pemerintah setempat. Hal ini menjelaskan bahwa diperlukannya internal audit dalam proses untuk meningkatkan keuangan daerah agar dapat digunakan sebagaimana mestinya baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Tim peneliti memilih pendekatan kualitatif untuk menghasilkan hasil audit internal tentang proses penganggaran dan alokasi dana di desa wisata religi cupak, jombang. Mereka juga akan memberikan saran kepada pihak yang berkepentingan. Peneliti berharap keterlibatan oleh pemerintah dan masyarakat desa cupak, jombang agar turut serta dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penganggaran dana desa.

**Kata kunci:** internal audit; proses; penganggaran; dana desa; cupak

## PENDAHULUAN

Pemerintah Desa Cupak Kabupaten Jombang memiliki jumlah penduduk sekitar 1.026 jiwa, mata pencahariannya pertanian dan memiliki potensi sebagai desa wisata religi dengan keberadaan makam dewi kili suci yang sering dikunjungi oleh mayarakat khususnya dari Jawa Timur.

Tingkat pembangunan manusia Kabupaten Jombang adalah menengah, menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,75. Di lain sisi Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cupak sebesar 0,7384 yang termasuk dalam kategori Desa Maju. Hal ini dapat dilihat dari nilai IDM yang sudah mencapai atau mendekati target nasional, yaitu 0,75.

Struktur Organisasi yang sudah didirikan untuk mendukung kinerja pemerintah desa Cupak adalah BUMDes, Koperasi Wanita, Karang Taruna, PKK dan kelompok UMKM sejenis yaitu UMKM tikar pandan dan diversifikasinya, UMKM Kripik Gadung, UMKM produsen arang, UMKM makanan ternak.

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA CUPAK KECAMATAN NGULISIKAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2023				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		34.500.000,00	0,00	34.500.000,00
Pendapatan Transfer		1.418.005.800,00	1.083.045.838,00	332.958.962,00
Dana Desa		699.103.000,00	444.861.800,00	254.441.200,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		37.085.800,00	37.085.800,00	0,00
Alokasi Dana Desa		379.817.000,00	301.299.238,00	78.517.762,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		4.820.000,00	5.059.739,00	239.739,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.466.325.800,00</b>	<b>1.088.106.577,00</b>	<b>367.229.223,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		499.074.655,00	240.141.200,00	258.933.455,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		667.614.500,00	538.419.400,00	131.195.100,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		126.919.360,33	40.300.000,00	86.619.360,33
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		90.820.800,00	39.768.000,00	50.832.800,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN SICILDESAR DESA		125.917.530,00	25.200.000,00	100.717.530,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.510.346.855,33</b>	<b>883.840.600,00</b>	<b>626.506.255,33</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(54.810.855,33)</b>	<b>206.267.977,00</b>	<b>(261.068.832,33)</b>
<b>PEMBAYARAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		54.810.855,33	54.810.855,33	0,00
<b>PEMBAYARAN NETTO</b>		<b>54.810.855,33</b>	<b>54.810.855,33</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>261.068.832,33</b>	<b>(261.068.832,33)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

CUPAK, 13 June 2023  
KEPALA DESA  
  
WINARSONO

Printed by SILPA/SILPA 13/06/2023 11:22:28

Halaman 1

**Gambar 1.** Laporan APB Cupak, Jombang

Fenomena yang ada menunjukkan desa Cupak terlihat tingkat kemandirian dalam tata kelola dana masih rendah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih kurang. Hal ini menunjukkan perlu digali potensi untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah untuk meningkatkan asli daerahnya belum optimal tercapai. Jika pemerintah desa tidak memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk mengelola Dana Desa, mengoptimalkan sumber daya pendamping masyarakat sebenarnya dapat membantu desa. Berdasarkan Permenkeu No 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa 30% dari Alokasi Dana Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian perlu didesain Perencanaan Penganggaran

Berbasis Kinerja pada pemerintah desa khususnya Desa Cupak Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang. Dari penjelasan dalam latar belakang tersebut dapat ditentukan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini yang meliputi apakah internal audit proses penganggaran dana Cupak sesuai dengan Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)? Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan hasil tentang pengaruh AI pada penganggaran dan pembagian dana di desa wisata religi Cupak, Jombang. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan saran kepada pihak yang berkepentingan. Kerangka pengendalian COSO dapat terdiri dari beberapa komponen antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### *1. Internal Audit*

Internal audit adalah sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif—semua (Sawyer, 2005: 10)

### *2. Diversitas Produk*

Diversitas pada produk merujuk pada variasi atau beragamnya produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau dalam suatu pasar tertentu. Ini mencakup berbagai macam produk yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti fitur, fungsi, ukuran, warna, gaya, dan lainnya. Diversitas produk adalah cara untuk memenuhi berbagai preferensi dan kebutuhan konsumen yang beragam.

Diversitas produk kali ini merujuk pada variasi dan beragamnya produk yang dibuat dari bahan anyaman pandan. Anyaman pandan adalah seni tradisional yang melibatkan penggunaan daun pandan untuk menciptakan berbagai barang, seperti keranjang, tas, tempat tisu, alas meja, hiasan dinding, dan banyak lagi. Diversitas pada produk anyaman pandan mencakup berbagai desain, bentuk, ukuran, dan fungsi yang berbeda.

### 3. COSO Framework

*Menurut COSO (1992), pengendalian internal merupakan suatu proses yang dapat dipengaruhi oleh dewan komisaris suatu entitas, manajemen dan personil lainnya yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam berbagai kategori. Kerangka pengendalian internal yang diterapkan di Intansi Pemerintahan di Indonesia mengacu pada kerangka pengendalian internal terintegrasi COSO (1992). Komponen pengendalian internal beserta prinsip-prinsip pengendalian internal.*

- *Lingkungan Pengendali*

*Pengendalian internal tidak akan mungkin efektif tanpa adanya lingkungan pengendalian. Menurut COSO, untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian harus mempertimbangkan prinsip-prinsip lingkungan pengendalian sebagai berikut: (a) Integritas dan nilai etika, (b) Komitmen terhadap kompetensi, (c) Tone at the top (Filosofi dan gaya operasi manajemen), (d) Struktur organisasi, (e) Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia*

- *Penilaian Risiko*

*Penilaian risiko adalah tahap awal dalam pembangunan infrastruktur pengendalian. Penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis yang relevan risiko terhadap pencapaian tujuan entitas dan menentukan respon yang tepat. Penilaian risiko terdiri dari atas: (a) Identifikasi risiko, (b) Evaluasi risiko, (c) Menilai risiko yang bisa diterima oleh organisasi, (d) Penanganan risiko*

- *Kegiatan Pengendalian*

*Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk mengatasi risiko dan untuk mencapai tujuan entitas. Agar menjadi efektif, aktivitas pengendalian harus sesuai, berfungsi secara konsisten sesuai rencana sepanjang periode dan menjadi efektif, komprehensif, masuk akal dan berkaitan langsung dengan tujuan pengendalian.*

- *Informasi dan Komunikasi*

*Informasi dan komunikasi adalah hal yang esensial dalam mewujudkan semua tujuan pengendalian internal. Informasi dan komunikasi berkaitan dengan kinerja*

*organisasi. Dalam banyak kasus informasi harus disediakan atau dikomunikasikan demi mematuhi aturan hukum dan regulasi yang ditetapkan.*

- *Pemantauan*

*Pemantauan pengendalian internal ditujukan untuk memastikan bahwa pengendalian dilakukan sesuai tujuan dan dimodifikasi secara tepat untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Pemantauan juga harus menilai apakah, dalam mengejar misi entitas, tujuan umum yang ditetapkan dalam defenisi pengendalian internal sedang dicapai.*

#### *4. Alokasi Dana Desa (ADD)*

Sesuai peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

#### *5. Kinerja*

Prawirosentono (dalam Pasolong, 2010: 176) mendefinisikan Kinerja sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang pegawai atau sekelompok pegawai suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing guna mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara sah, tanpa melanggar hukum dan sesuai dengan moralitas dan etika. Sedangkan, Pemerintah Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.” Sehingga Kusnendar, A. (2018) menyimpulkan bahwa Kinerja Pemerintahan Desa merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan, visi dan misi pemerintah/organisasi desa yang telah ditetapkan.

#### *6. Performance Based Budgeting*

Performance Based Budgeting atau Pendekatan penganggaran berbasis kinerja berdasarkan PMK No. 94 tahun 2017 merupakan pendekatan sistem anggaran yang memperhatikan hubungan antara sumber daya keuangan dengan kinerja yang diharapkan, serta efektivitas yang efektif dalam mencapai efisiensi operasional tersebut. Kinerja merupakan hasil kerja berupa hasil operasional yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, satuan kerja, dan satuan kerja (satker) dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Tidak dipungkiri bahwa hingga saat ini penganggaran berbasis kinerja masih menjadi primadona sistem penganggaran terbaik. Hal ini sesuai pendapat

Mardiasmo (2009) bahwa performance budget pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran dengan berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Mohammadipour (2014) menyebutkan bahwa, "Performance-based budgeting is one of the most important parts of budgeting system and plays essential role for the success of any organization" dalam pelaksanaannya, pendekatan pilar tersebut fokus pada penganggaran berbasis kinerja.

Willoughby (2011) dalam Hijal-Moghrabi (2017) mendefinisikan penganggaran berbasis kinerja sebagai proses pengembangan ukuran kinerja kegiatan, layanan, dan program pemerintah dalam proses penganggaran, yang bertujuan untuk menjalin hubungan antara anggaran input dan output dan hasil (results) kegiatan yang diharapkan, termasuk efektivitas dalam mencapai keluaran dan hasil.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja memerlukan tiga komponen untuk masing-masing program dan kegiatan sebagaimana uraian Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berupa:

a) Indikator Kinerja

Merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Program (IKU Program) untuk menilai kinerja program, Indikator Kinerja Kegiatan (IK Kegiatan) untuk menilai kinerja kegiatan, dan Indikator Keluaran untuk menilai kinerja subkegiatan (tingkatan di bawah kegiatan).

b) Standar Biaya.

Merupakan alat bantu untuk penyusunan anggaran, merupakan kebutuhan anggaran yang paling efisien untuk menghasilkan keluaran, dan standar biaya dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan oleh K/L (Standar Pelayanan Minimal).

c) Evaluasi Kinerja

Merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi dan efektivitas dari suatu program atau kegiatan. Cara pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil terhadap target (dari sisi efektivitas) dan realisasi terhadap rencana pemanfaatan sumber daya (dilihat dari sisi efisiensi). Hasil evaluasi kinerja merupakan umpan balik (feed back) bagi suatu organisasi untuk memperbaiki kinerjanya

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan studi fenomenologi terkait penganggaran dan pengalokasian dana desa. Tujuan studi fenomenologi adalah menghasilkan proposisi dan menghasilkan rancangan atau desain perencanaan penganggaran berbasis kinerja desa. Hal ini berarti bahwa dalam penelitian ini digambarkan tentang hasil penelitian mengenai kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Cupak Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Semua itu dilakukan secara mendalam oleh peneliti guna mendapatkan data dan fakta yang akurat guna memperoleh pemahaman terhadap pengalaman pribadi diharapkan dapat membantu proses kebijakan pengembangan atau untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti

### *1. Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti penulis.
- b. Studi Lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara:
  1. Wawancara, merupakan pertemuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
  2. Observasi, merupakan suatu pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti.
  3. Dokumentasi, merupakan pengumpulan data melalui arsip, catatan, dan segala bentuk peraturan perundang – undangan, dan sebagainya.

### *2. Lokasi dan Waktu Penelitian*

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cupak Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang dengan rentang waktu yang berlangsung dalam rentang waktu enam bulan, terhitung mulai bulan 2023 sampai dengan bulan 2023.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan internal audit berdasarkan proses penganggaran kinerja dibuat sistematis oleh tim peneliti dengan digambarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 1. Implementasi Kerangka COSO**

Objective dan Goal Setting	Control Environment	Event Identification	Risk Assesment
<p>Objective:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (metode SMART) untuk merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan jangka Panjang</li> <li>Melibatkan aparat desa lainnya dan anggota masyarakat dalam proses penetapan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan tersebut relevan dan dapat dicapai</li> </ul> <p>Goal Setting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan lama tujuan akan tercapai</li> <li>Mengembangkan kebiasaan baru</li> <li>Menggunakan SMART untuk mencapai tujuan jangka panjang dana hibah Anda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan SOP yang jelas</li> <li>Harus ada TUPOKSI yang tertulis dan disepakati</li> <li>Menjalin hubungan baik antara pimpinan dan bawahan agar dapat bekerja sama memberikan pelayanan</li> </ul>	<p>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan dan penegasan batas Desa masih belum jelas</li> <li>pendataan Desa selalu berubah-ubah dan masih kurang optimal</li> <li>penyusunan tata ruang Desa kurang maksimal</li> <li>penyelenggaraan musyawarah desa kurang maksimal</li> <li>pengelolaan informasi Desa kurang optimal</li> <li>penyelenggaraan informasi Desa kurang optimal</li> <li>penyelenggaraan perencanaan Desa kurang optimal</li> <li>penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa kurang optimal</li> <li>penyelenggaraan kerjasama antar desa masih belum ada</li> <li>pembangunan sarana dan prasarana kantor desa masih belum maksimal</li> </ul> <p>Bidang Pelaksanaan Pembangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>tidak ada batasan-batasan yang harus dipatuhi untuk perangkat desa, Masyarakat, dan pendatang</li> <li>tidak ada SOP untuk perangkat desa</li> <li>pencatatan data yang tidak akurat</li> <li>kurangnya perhatian terhadap sarana dan prasarana</li> <li>tidak ada pelatihan untuk peningkatan kompetensi terhadap perangkat desa</li> </ul>



		<p>infrastruktur dan lingkungan Desa yaitu berupa tembok penahan jalan, masih belum memadai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan seperti kamar mandi umum, gedung polindes</li> <li>• Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pendidikan dan kebudayaan seperti APE untuk anak TK gedung PAUD halaman sekolah yang masih minim</li> <li>• Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi seperti saluran irigasi dan jalanan pertanian yang masih belum memadai</li> <li>• Pelestarian lingkungan hidup untuk penanaman pohon dan tanaman obat juga masih belum maksimal</li> </ul> <p>Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Lembaga Masyarakat yaitu seperti Pembinaan administrasi masih belum dimaksimalkan</li> <li>• penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban seperti poskamling dan</li> </ul>	
--	--	--	--

		<p>peralatan keamanan belum lengkap</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pembinaan kerukunan umat beragama seperti kegiatan hari besar agama belum optimal</li><li>• pembinaan lembaga adat seperti bersih desa masih belum optimal</li><li>• pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat masih belum maksimal</li><li>• Pelatihan usaha ekonomi pertanian dan Perdagangan seperti pengelolaan pertanian dan lain sebagainya masih belum ada</li><li>• pelatihan teknologi tepat guna seperti pembuatan pupuk organik juga masih belum maksimal</li><li>• pendidikan pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan BPD dan lembaga lainnya masih belum optimal</li></ul>	
--	--	--	--

**Tabel 2. Pembahasan COSO**

<b>Risk Respond</b>	<b>Control Activity</b>	<b>Communication &amp; Information</b>	<b>Monitoring &amp; Evaluating</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dibuat peraturan dan standar operasional prosedur yang jelas</li> <li>• Meningkatkan jumlah dan kompetensi kapasitas sumber daya manusia</li> <li>• Perlu tersedianya sarana dan prasarana aparatur di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa</li> <li>• Perlu dilakukan manajemen risiko untuk mengelola risiko secara efektif, penting untuk memiliki proses manajemen risiko yang praktis, berkelanjutan, juga mudah dipahami, dan berukuran tepat untuk desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat draf peraturan dan SOP yang disetujui Bersama saat Musrenbangdes</li> <li>• Melakukan validasi data dan mengoreksi kesalahan pada saat input data, sebelum data diproses lebih lanjut</li> <li>• Melakukan pemeriksaan pencatatan terhadap data-data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan hubungan baik terhadap seluruh perangkat desa</li> <li>• Melakukan konfirmasi dengan terjun langsung ke lapangan untuk validasi data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan peraturan dan standar operasional prosedur disepakati Bersama</li> <li>• Memastikan sarana dan prasarana apa saja yang diperlukan dan perlu diperbaiki</li> <li>• Mengevaluasi SOP yang sudah disepakati dalam waktu tertentu</li> <li>• Mengevaluasi hasil dari manajemen risiko</li> </ul>

## **KESIMPULAN**

Peneliti melakukan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan temuan internal audit terhadap proses penganggaran dan alokasi dana desa wisata religi Cupak, Jombang serta memberikan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan. Peneliti melibatkan peran Pemerintah dan masyarakat desa Cupak, Jombang agar turut serta dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penganggaran dana desa. Namun peneliti masih akan melanjutkan proses penelitian di tiga bulan tersisa untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang lebih valid. Periode berikutnya yaitu pendampingan dengan agenda pengevaluasian dan peningkatan internal audit proses penganggaran di desa Cupak, Jombang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hijal-Moghrabi, I. (2017). The Current Practice of Performance-Based Budgeting in The Largest U.S. Cities : An Innovation Theory Perspective. *Public Performance and Management Review*, 40(4), 652–675. <https://doi.org/10.1080/15309576.2017.1313168>.
- [2] Hwihanus, Tri Ratnawati, Indrawati Yuhertiana. Audit Opinion: Model Value of the Firm State-Owned Business Enterprises Indonesia. *Manag Stud*. 2019 May 28;7(5).
- [3] Hwihanus H, Ratnawati T, Yuhertiana I. Analisis Pengaruh Fundamental Makro dan Fundamental Mikro Terhadap Struktur Kepemilikan, Kinerja Keuangan, dan Nilai Perusahaan pada Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Bus Financ J*. 2019;4(1):65–72.
- [4] Kusnendar, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(3), 1-8.
- [5] Kustiwi, I. A. (2023). Peningkatan AI 3108 Dalam Studi Kelayakan Bisnis Perikanan Menur Pumpungan Surabaya. *PSHPM: Prosiding Seminar Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat*, Jilid 2.
- [6] Kustiwi, I. A., Hidayati, C. (2022). Communication Techniques and Public Speaking to Improve the Skills of Youth Cadets in Cupak Village, Jombang. *Proceeding Global Conference on Social Science*.
- [7] Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- [8] Mohammadipour, R. (2014). A Study on the Effect of Performance Based Budgeting Using Activity-Based Cost Method. *Management Science Letters* 4 (2014) 145–148. doi: 10.5267/j.msl.2013.11.021.)
- [9] Nanda, R., & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol.1, No(1), 327–340.
- [10] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- [11] Robinson, M., & Duncan Last. (2009). *A Basic Model of Performance-Based Budgeting*.